

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa

- a. Fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa Pantai Oasudah sesuai dengan alur pembuatan peraturan menurut permendagri No.111 Tahun 2014. Fungsi BPD sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini terdapat beberapa masalah atau kendala. Kendala tersebut antara lain: kurang aktifnya anggota BPD di kantor.
- b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD masih terdapat beberapa masalah atau kendala seperti tidak adanya sarana dan prasarana seperti kantor atau gedung untuk BPD sehingga aspirasi masyarakat hanya berlangsung di kantor desa.
- c. Fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan aturan akan tetapi dilihat dari kehadirannya sangat minim. Ada anggota BPD yang jarang hadir di kantor sehingga fungsi BPD terkhususnya pada fungsi kontrol atau mengawasi kinerja kepala desa terkesan belum maksimal.

- d. Kendala-kendala dari masyarakat juga menjadi faktor penentu fungsi BPD. Adapun faktor yang menjadi tantangan fungsi BPD itu sendiri seperti kekurangan SDM dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing serta kemampuan dalam operasional masih sangat minim sehingga BPD belum melaksanakan tugas mereka dengan baik

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat memperbaiki maupun menyempurnakan pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

Bagi ketua BPD harus selalu memperhatikan anggotanya, memberikan motivasi bagi anggota sehingga anggota BPD jangan terkesan bekerja belum maksimal. Perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD dengan kepala desa dan aparaturnya sebagai pelaksana pemerintahan desa, agar pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pantai Oa dapat terlaksana dengan optimal.

Terkait sarana dan prasarana BPD disarankan kedepannya fasilitas pelayanan BPD lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang kualitas BPD di Desa Pantai Oa dan perlunya bantuan dari pihak masyarakat dalam bentuk pengawasan BPD di Desa Pantai Oa, agar aparat desa mengerti akan tanggung jawab yang mereka kerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Amirudin, M. 2003. *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*. Yayasan
Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia
Indonesia: Yogyakarta.
- Bahrein, T. Sugihen. 1996. *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Raja
Grafindo: Jakarta.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai
Alternatif Pendekatan*. Pustaka Media Group : Jakarta.
- Djam'an, Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Alfabeta: Bandung.
- Erlis, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya*. Ghalia: Bogor.
- Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press : Malang.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia*. Grafindo: Jakarta.
- Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakara: Bandung.

- Maringan, 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia : Jakarta.
- Maryadi, Dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. UMS : Surakarta.
- Marshall, Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*. Sage Publications: London.
- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito : Bandung.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Purwoko, Budi. 2008. *Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*. UNP: Surabaya
- Roucek, JS. Warren. 1963. *Pengantar Sosiologi*. Bina Aksara: Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Rosdakarya: Bandung.
- Sradley, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3: Malang.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R D*. Alfabeta: Bandung.
- Syahida, 2014. *Implementasi Peraturan Daerah*. Pustaka Baru: Yogyakarta
- Taufik, Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah*. Gramedia: Jakarta
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Aditama: Bnadung.

Wastistono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia : Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo: Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*. Raja Grafindo: Jakarta.

Yin, R.K.2003.*Case Study Research: Design and Methods (3rded)*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.

Jurnal

Syahyadi, 2014. *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di*

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Hasanuddin, Makassar.

Tumbel, Satria Mentari. 2014. *Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

Dokumen :

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri No.111 tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN (1). Pedoman Wawancara

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi kasus di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur)

Dalam rangka untuk menyelesaikan tesis di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang: saya sebagai peneliti mohon bantuan anda, yaitu Bapak/Ibu selaku kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD, staf Desa dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur, agar berkenan memberi jawaban pertanyaan yang telah saya sajikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan atau bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pantai Oa. Saya sangat menghargai kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan dan menjamin kerahasiaan anda yang terkait dengan pertanyaan ini. Hasil survei ini hanya semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian dan pendidikan bukan untuk keperluan komersial.

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Formal Terakhir :

a. S1

b. SMA

c. SMP

d. SD

Pekerjaan :

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara langsung. Pertanyaan ini akan berkembang sesuai hasil jawaban atas pernyataan tersebut.

A. Pertanyaan untuk BPD dan Anggota BPD

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Oa ?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ?
3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas ?
4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan kepada masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa ?
5. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ?
6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKPDes dan APBDes ?
7. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ?

8. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya ?
9. Faktor apa saja yang menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Desa Pantai Oa ?
10. Apakah sarana dan Prasarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjang lembaga tersebut?

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparat Desa)

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Oa ?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ?
3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas ?
4. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ?
5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKPDes dan APBDes ?
6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ?
7. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya ?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat (termasuk tokoh masyarakat)

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Oa ?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ?
3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas ?
4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan kepada masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa ?
5. Sejauh mana peran dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pada rencana pembangunan Desa Pantai Oa tahun 2019 ?
6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rencana pembangunan Desa Pantai Oa tahun 2019 secara langsung kepada masyarakat ?
7. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya ?
8. Sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pantai Oa dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?

